

KONSTRUKSI DAN MODEL PRAKSIS PENDIDIKAN INKLUSIF (Suatu Analisis dengan Pendekatan Sosio-Eksploratif)

Masbur

**Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email:masbur_mb@yahoo.co.id**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan suatu proses interaksi dua arah yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kognitif, afektif dan psikomotorik, pengaruh tersebut dapat terstimulus secara signifikan tanpa terbatas dalam memori setiap individu. Pendidikan juga tidak hanya terbatas pada individu yang sempurna lahir dan bathin saja, tetapi pendidikan itu juga dapat dirasakan oleh komponen lain yang masih kurang dari segi psikologi, mental, atau dari segi fisiologisnya. Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep pembelajaran yang menempatkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa biasa dalam satu ruang sosial dengan kedudukan yang sejajar. Pendidikan yang menghargai perbedaan ini didasari oleh konsep kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap orang dan masyarakat. Ia merupakan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan sesama yang beragam baik dari segi fisik, agama, suku, dan lain-lain. Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai simulasi arena kehidupan nyata yang plural, terus berkembang dan berubah. Hal ini didasari oleh adanya kepekaan dan solidaritas di antara peserta didik. Potensi transedental, intelektual, moral dan estetis dikembangkan dengan cara mengintegrasikan nuansa moralitas dan spiritual di dalam kurikulum. Pelajaran agama pun tidak sekadar merupakan penyalehan individu namun lebih dari itu, pelajaran agama yang diberikan berfungsi untuk penyalehan sosial. Sikap dan sifat yang umumnya berkembang di masyarakat plural seperti di Indonesia antara lain memiliki solidaritas buta, etnosentrisme, partikularis, eksklusif serta masalah mayoritas-minoritas yang berujung pada ketidakadilan di dalam masyarakat. Sebagai negara yang memiliki beragam etnis, religi dan budaya, Indonesia perlu menerapkan pola pendidikan yang mampu menghadapi keberagaman.

Kata Kunci : Konstruksi, Pendidikan Inklusif, Sosio-Eksploratif

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia karena pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat bagi terciptanya peradaban manusia. Tanpa pendidikan, diyakini bahwa manusia sekarang tidak berbeda dengan generasi manusia masa lampau yang dibandingkan dengan manusia sekarang telah sangat tertinggal baik kualitas kehidupan maupun proses-proses pemberdayaannya. Secara

ekstrim bahkan dapat dikatakan, bahwa maju mundurnya atau baik buruknya peradaban suatu masyarakat, suatu bangsa, akan ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang dijalani oleh masyarakat bangsa tersebut. Tidak berlebihan jika pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang suatu bangsa, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Kondisi pendidikan yang sentralistis sejak era Orde Baru dapat dikatakan telah mematikan roh pendidikan di Indonesia. Semua elemen pendidikan diarahkan untuk kepentingan penguasa, untuk melegitimasi kedudukan penguasa Orde Baru, bukannya demi kemajuan peserta didik. Kurikulum yang padat dan militeristik sengaja diciptakan agar semua peserta didik (dan guru) memiliki pola pikir yang seragam. Sebagai contoh, pada pelajaran Sejarah siswa hanya diajarkan peristiwa G 30 S versi pemerintah, padahal menurut bukti sejarah terdapat banyak versi peristiwa tersebut. Siswa tidak dibimbing untuk mengetahui konteks historis peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia namun hanya dicekoki dengan kebenaran yang dipaksakan.

Kurikulum yang berkaitan dengan wacana kemanusiaan harus merupakan pegangan tentang tujuan metode, lingkup materi, dan evaluasi pendidikan yang terintegrasi,¹ karena kurikulum yang tersentralisir dan menganut kebenaran tunggal serta tidak memberi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi akan memasung kreativitas dan daya kritis siswa. Sistem pendidikan semacam itu tidak mustahil akan menghasilkan individu-individu tanpa inisiatif dan tidak memiliki inkuisitas terhadap ilmu pengetahuan:

Kurikulum yang bersifat absolut, pedagogi yang berbentuk alih pengetahuan dan sistem evaluasi yang bersifat reproduksi pengetahuan yang telah dipelajari menghasilkan lulusan, meminjam istilah Wildam Yatim, para SDM yang bekerja sebagai tukang. Pendidikan menghasilkan manusia yang berpikir dalam dimensi “benar-salah”. Benar berarti sesuai dengan yang datang dari ‘atas’, dari pengajar, dari pejabat, dari atasan. Salah berarti berasal dari arah yang bukan ‘atas’. Mereka akan bekerja seperti mesin fotokopi yang bernapas. Mereka bekerja seperti robot, ‘ya’ atau ‘tidak’ sesuai dengan perintah programnya, manusia yang telah kehilangan keunikan dan otonominya. Selain itu, pendidikan semacam ini juga berhasil membuat manusia Indonesia menyenangi sesuatu yang serba seragam, sesuatu yang serba sama, sesuatu yang homogen. Dalam setiap kesempatan selalu terdengar perkataan ‘untuk menyamakan persepsi’, ‘untuk menyamakan sudut pandang’ dsb. Akibatnya, banyak orang tidak berani menampilkan dirinya, berbeda pandangan dengan pandangan orang banyak atau pandangan yang sejalan dengan pandangan ‘atasan’nya. Mereka takut diberi label ‘tidak benar’ atau ‘salah’. Apalagi label ‘salah’ tersebut diikuti oleh proses

¹ A. Waidl. *Pendidikan yang Memahami Manusia* dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 24.

peminggiran kepada yang bersangkutan. Berbeda pendapat dengan ‘atasan’ berarti ‘harus tidak kebagian’. Dengan demikian, banyak orang terdorong untuk ‘berpurapura’ berpandangan sama dengan pandangan ‘atasan’ agar tetap di dalam lingkungan di sekitar ‘atasan’ dan tidak dipinggirkan.²

Menurut Darmaningtyas, fungsi pendidikan bukanlah untuk menyamakan selera agar menjadi tunggal, tetapi memelihara dan mengembangkannya agar tetap beragam.³ Sebab keragaman itu sendiri merupakan keindahan dunia. Bukankah dunia lebih indah karena memiliki banyak warna, tidak hanya hitam dan putih? Lanjutnya, melarang perbedaan adalah identik dengan merampas kemerdekaan orang lain; dan itu bertentangan dengan prinsip pendidikan yang harus membimbing individu untuk mencapai kemerdekaannya.⁴ Seorang tokoh nasional yang *concern* di bidang pendidikan, Romo Mangun, menyebut kurikulum nasional pada era Orde Baru tidak lebih sebagai kurikulum terselubungi yang mengadopsi sistem militer dan diperkuat oleh kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang ditulis berikut ini:

Memang resmi untuk muatan lokal cukup diberi banyak kesempatan sehingga guru dapat menyesuaikan isi sebagian kurikulum dengan suasana dan keperluan khas setempat. Tetapi dalam iklim yang serba satu ragam, satu bahasa dan gaji terlalu sedikit, mana ada guru yang masih sempat berkreasi? Dan bila toh masih ada guru yang begitu cinta kepada anak-anak didiknya, dan ingin membuat eksperimen itu masih dalam batas-batas ketentuan Depdikbud, apakah Kakanwil dan rekan-rekan guru akan mendukung orang yang berjalan kreatif lucu di luar barisan? Bukankah keseragaman dan kesatubahasaan di Indonesia adalah hukum, yang sering lebih tinggi daripada hukum Tuhan? Tuhan, mencipta anak yang serba dinamis, bergerak dan bermain, serba mencari dengan kagum. Tetapi menurut peraturan (dari mana, entah), anak-anak TK harus berbaris dan berseragam seperti itik, terkotak, dan terpagar. Iklim sekolah membuat anak-anak segan bertanya dan lebih “aman” untuk menghafal, dan menghafal seolah-olah Tuhan menciptakan anak muda dan remaja itu sebagai beo. Padahal remaja direka Tuhan justru agar semakin kritis dan serba bertanya, bahkan membantah terhadap dimensi-dimensi sikap yang perlu agar mantap perkembangannya, menuju kedewasaannya menjadi pribadi yang kuat.⁵

Penyeragaman tidak hanya terdapat pada kurikulum namun juga pakaian seragam, aktivitas, hingga metode mengajar dan alat tes kelulusan. Pemerintah tidak memberi

² Leo Sutrisno, *Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme* dalam Th. Sumartana, dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hal 208-9

³ Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 180

⁴ Ibid. hal. 126.

⁵ YB. Mangunwijaya, Kompas, 28 September 1988 dalam Y. Dedy Pradipto, *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional: Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 63.

kesempatan kepada siswa dan sekolah untuk menggunakan pakaian seragam sesuai selera atau identitas historis sekolah. Semua harus seragam, merah putih untuk sekolah dasar, biru putih untuk tingkat menengah pertama dan abu-abu putih untuk tingkat menengah atas. Upacara bendera juga harus dilaksanakan setiap hari Senin untuk meningkatkan patriotisme dan cinta tanah air, padahal sebenarnya masih banyak cara untuk menumbuhkan patriotisme dan cinta tanah air di kalangan siswa. Rutinitas penyeragaman ini telah berlangsung selama beberapa dekade walau pun tidak memiliki dasar yang kuat, kecuali alasan militeristik, “Aturan dari atas”, “Demi ketertiban”, atau ”Menghindari kesenjangan sosial” yang terkesan mengada-ada.

Indonesia adalah negara yang plural, terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa dan agama. Sebagai negara multikultural, pendidikan yang diadakan di Indonesia seharusnya merupakan pendidikan yang menanamkan toleransi terhadap keberagaman, bukannya menyeragamkan siswa secara nasional dan menghilangkan ciri-ciri lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Siswa yang tidak diajarkan mengenai keunggulan budaya lain akan menganggap budayanya sebagai kebenaran mutlak dan tidak menoleransi perbedaan di dalam masyarakat. Penghargaan terhadap keberagaman dapat ditemui pada konsep pendidikan inklusif yang saat ini menjadi salah satu alternatif pendidikan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Aceh yang akan melaksanakan dan menerapkan pendidikan inklusif. Sebagai kabupaten yang akan menerapkan pendidikan inklusif, konsep pendidikan inklusif dan pembelajaran Kabupaten Aceh Besar harus merupakan sebuah konsep pembelajaran yang menempatkan siswa berkebutuhan khusus dan siswa biasa dalam satu ruang sosial dengan kedudukan yang sejajar. Pendidikan inklusif memiliki keterkaitan dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sedangkan pendidikan inklusif diartikan sebagai pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Proses pembelajaran inklusif dalam suasana saling menghormati akan menanamkan dan melatih nilai-nilai pada anak didik sehingga nantinya mereka memiliki spirit multikultural berupa hidup secara rukun dan damai dalam suasana kemajemukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang “Konstruksi dan Model Praksis Pendidikan Inklusif (Suatu analisis dengan pendekatan sosio-eksploratif)”.

B. Rumusan Masalah

Pendidikan yang ditawarkan dalam konsep pendidikan inklusif memberi alternatif konsep pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional kita. Di tengah sistem pendidikan nasional yang berkultur homogen, pendidikan inklusif melawan *mainstream* dengan melaksanakan pembelajaran yang menghargai perbedaan fisik pada tiap anak. Oleh karena itu, keunikan pembelajaran pendidikan inklusif menimbulkan beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana konstruksi pendidikan inklusif yang harus dibangun?
2. Bagaimana praksis pendidikan inklusif?
3. Bagaimana *output* praksis pendidikan inklusif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Peneliti menilai pendidikan inklusif dapat memperkaya atmosfer pembelajaran di Indonesia, khususnya di Aceh dengan kebijakan inklusinya yang menjadi pendidikan alternatif bagi siswa dan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan sekolah menengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menelusuri konstruksi pendidikan inklusif serta menjelaskan praksis konsepsi pendidikan inklusif beserta *output* yang dihasilkan dari pendidikan inklusif.

D. Kerangka Teori

1. Pandangan Freire terhadap Pendidikan

Manusia adalah makhluk yang merdeka dan berpikir secara bebas. Oleh karena itu, Freire berkeyakinan bahwa pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri secara obyektif dan subyektif. Pendapat ini dikuatkan oleh Romo Mangun dengan pernyataannya di dalam Pradipto, “Kemerdekaan dalam pendidikan dapat dilihat sebagai kemampuan anak untuk mengakses pengetahuan dengan caranya sendiri”.⁶

Menurut Escobar, sekolah adalah lembaga sosial yang pada umumnya mempreservasi kekuatan-kekuatan sosial-politik yang ada atau menjaga *status quo* bukan membebaskan manusia dari tirani kekuasaan.⁷ Sedangkan Freire menyatakan hakikat pendidikan adalah pembebasan manusia dari berbagai penindasan. Menurut Freire, pendidikan dengan sistem “gaya bank” merupakan pendidikan yang menindas peserta didik karena meminimalisir kebebasan mereka untuk berkreasi dan berpikir kritis.

Pendidikan gaya bank semacam ini akan menjadi sarana untuk mendehumanisasi peserta didik. Oleh karena itu, Freire menciptakan alternatif sistem pembelajaran “*problem posing education*” yang dialogis dan memungkinkan guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru. Di dalam sistem pembelajaran hadap-masalah ini guru berperan sebagai pendamping yang merangsang pemikiran kritis peserta didik mengenai dirinya dan dunia tempatnya berada, seperti yang ditulisnya di Pendidikan Kaum Tertindas:

Akhirnya, dialog sejati tidak akan terwujud kecuali dengan melibatkan pemikiran kritis - pemikiran yang melihat suatu hubungan tak terpisahkan antara manusia dan dunia tanpa melakukan dikotomi antara keduanya - pemikiran yang memandang realitas sebagai proses dan perubahan, bukannya entitas yang statis - pemikiran yang tidak memisahkan diri dari tindakan, tetapi senantiasa bergumul dengan masalah-masalah keduniawian tanpa gentar menghadapi risiko. Bagi pemikir naif, yang penting adalah memberi tempat bagi

⁶ Yosef Dedy Pradipto, *Belajar Sejati versus Kurikulum Nasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal.15

⁷ Escobar dalam H.A.R. Tilaar. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002. hal. 64

“hari ini” yang normal itu. Bagi pemikir kritis, yang penting adalah kelanjutan dari perubahan realitas, demi kelanjutan proses humanisasi manusia.⁸

Mochtar Buchori dalam Transformasi Pendidikan juga mengungkapkan pentingnya transformasi pendidikan di Indonesia dari ‘sekolah tempat menghafal’ menjadi ‘sekolah tempat berpikir’, yaitu sekolah sebagai sarana untuk menumbuhkan daya kritis siswa terhadap realita dunia. Dengan kemampuan berpikir yang disertai daya kritis, seseorang dapat terus-menerus mempersalahkan pendapatnya sendiri dan membuat reinterpretasi terhadap dunianya. Menurutnya, ‘mendewasakan anak’ tidak sekadar “mengajarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan” namun merupakan “proses membimbing anak untuk sedikit demi sedikit mengenali dirinya sendiri, menyadari kemampuan-kemampuannya, dan menyadari pula hal-hal yang terletak di luar batas kemampuannya”.⁹

2. Hakikat Pendidikan

Menurut Nasution dalam Sosiologi Pendidikan (1983), pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda.¹⁰ Lanjutnya, pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.¹¹

Pendidikan berperan besar dalam menanamkan nilai dan norma yang ditaati masyarakat serta membentuk pribadi yang disiplin dan taat. Hasil cetak kepribadian manusia adalah hasil dari proses transformasi pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan secara humanis, bukan secara politis maupun kapitalis. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan bukan semata ditunjukkan dari nilai akademis namun juga perilaku sehari-hari, kesehatan mental serta kepribadian peserta didik.

Menurut Plato, pendidikan ada pada kualitas etis. Pendidikan sekolah harus memainkan perannya yang lebih sejati, yakni sebagai sarana regenerasi sosial.¹² Pendidikan menjadi tempat untuk menumbuhkembangkan kepekaan peserta didik akan nilai-nilai dan norma moral dan secara progresif mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan Freire berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah membuat peserta didik sampai pada tingkat kesadaran akan realitas diri dan

⁸ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. VI, edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hal. 83.

⁹ A. Waield. op.cit. hal.156

¹⁰ Lihat Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Jemmars, 1983).

¹¹ Ibid.

¹² A. Supratikno. *Hantu Masyarakat Bernama Pendidikan*, dalam Basis, No.01-02, Tahun ke-47 1998, hal. 90.

dunianya. Kesadaran itu hanya dapat terwujud saat dimensi-dimensi humanistik peserta didik mendapat tempat dalam kegiatan belajar mengajar, seperti dihargainya keunikan, kreativitas dan otonomi serta kebebasannya.

Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu (pengetahuan) dari satu orang ke satu atau beberapa orang lain, tapi juga mentransformasikan nilai-nilai (bukan nilai hitam di atas kertas putih) ke dalam jiwa, kepribadian, dan struktur kesadaran manusia itu. Pendidikan merupakan proses dialektis. Peserta didik seharusnya berperan sebagai subyek yang bergulat maksimal dalam proses pendidikan didampingi oleh para pendidik, bukannya obyek yang sekedar menerima ilmu pengetahuan dari pendidik.

Lebih dari itu, realisme melihat pendidikan sebagai sarana di mana orang harus memperoleh pengetahuan dan pengertian yang mendalam. Hal ini dapat dicapai dengan menjelajahi permasalahan lewat dunia nyata. Menurut Romo Mangun kita harus menjadi pembelajar sejati, yaitu belajar sebagai bentuk kesadaran yang tidak akan berhenti meski pun sekolah telah berakhir.¹³ Sejatinya, pendidikan difungsikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki nilai, norma, dan perilaku sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai dengan tata cara hidup bangsa. Dalam hal ini pendidikan bertujuan memberikan bekal moral, intelektual dan keterampilan agar peserta didik siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Pendidikan mengenai baik-buruk atau benar-salah harus ditempatkan pada posisi sentral dalam ranah pendidikan karena pendidikan secara murni berupaya membentuk insan akademis yang berwawasan dan berkepribadian kemanusiaan.

Driyarkara mengungkapkan, pendidikan adalah hominisasi (menjadikan seseorang menjadi manusia) dan humanisasi (proses pengembangan kemanusiaan manusia). Peserta didik harus belajar bertanggung jawab untuk menciptakan situasi masyarakat yang tenteram karena pendidikan yang benar bertujuan mengarahkan manusia-manusia muda menjadi pribadi yang berkarakter serta mengenal budi pekerti (tidak sebatas nilai) agar mereka mampu menghadapi segala tantangan zaman. Tercapainya “kesempurnaan” ditunjukkan oleh terbentuknya “pribadi yang bermoral” atau *moral character*.¹⁴ Pendidikan yang berhasil juga akan menghasilkan pribadi-pribadi tangguh yang memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Sedangkan di dalam Pendidikan

¹³ Ibid.

¹⁴ Montemayor dalam YB. Adimassana, *Revitalisasi Pendidikan Nilai di Dalam Sektor Pendidikan Formal* dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 35.

Berbasis Masyarakat, Zubaedi mengungkapkan pentingnya menanamkan pendidikan budi pekerti pada anak didik, tidak sekadar memfokuskan pada sisi kognitif saja.

“Dengan memperkaya dimensi nilai, moral dan norma pada aktivitas pendidikan di sekolah, akan memberi pegangan hidup yang kokoh bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan bekal pendidikan budi pekerti secara memadai, akan memperkuat konstruksi moralitas peserta didik sehingga mereka tidak gampang goyah dalam menghadapi aneka macam godaan dan rayuan negatif di luar sekolah”.¹⁵

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Muslikhah di dalam *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*, bahwa ideologi pendidikan yang memanusiakan manusia berimplikasi kepada semua aspek kehidupan manusia dan memperhatikan seluruh dimensi yang ada dalam diri seseorang.¹⁶ Pendidikan dengan kurikulum yang terlalu padat, banyak menghafal dan bersifat satu arah akan membuat anak didik tidak memiliki keterampilan hidup karena mereka tidak diajarkan untuk mengenal kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, hubungan dialektis di dalam pendidikan harus melibatkan unsur pengajar, pelajar atau anak didik serta realitas dunia. Selama ini yang sering terjadi adalah sekolah diisolasi, terasing dari masyarakat karena tidak peka terhadap permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Bahkan, sekolah-sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sering kurang mampu mengikuti dan menanggapi arus perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

3. Pendidikan dan Multikulturalisme

Multikultur berasal dari kata multi (banyak) dan kultur (budaya). Multikulturalisme menegaskan bahwa setiap budaya unik namun tidak semuanya baik, karena multikulturalisme tetap memiliki postulasi kebaikan moral yang menolak penyelewengan-penyelewengan seperti berjudi, mencuri atau merendahkan perempuan. Alo Liliweri dalam *Prasangka dan Konflik* mengungkapkan beberapa pengertian multikulturalisme, yaitu: 1) multikulturalisme adalah konsep yang

¹⁵ Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2006), hal 3

¹⁶ Muslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press bekerjasama dengan JP Books, 2007), hal. 55-56.

¹⁷ J. Sudarminta, *Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga* dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal. 3.

menjelaskan dua perbedaan dengan makna yang saling berkaitan, yaitu sebagai kondisi pluralisme budaya masyarakat dan sebagai seperangkat kebijakan pemerintah yang dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat memberi perhatian kepada kebudayaan dari seluruh etnis; 2) multikulturalisme sebagai konsep sosial yang diintroduksi ke pemerintahan agar pemerintah sebagai pihak yang representatif dapat menjadikannya kebijakan yang mampu mendorong lahirnya apresiasi, toleransi serta prinsip kesetaraan; 3) multikulturalisme merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keragaman latar belakang kebudayaan para peserta didik sebagai kekuatan untuk membentuk sikap multikultural; dan 4) multikulturalisme sebagai sebuah ideologi dapat dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan melalui pertukaran kebudayaan atau perilaku budaya setiap hari sebagai pedoman dalam kehidupan multikultural.¹⁸

Di dalam bidang pendidikan, multikulturalisme berarti pengakuan terhadap kontribusi semua kelompok kultural terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusasteraan, dan dengan demikian kurikulum yang dikembangkan harus pula mencakup semua materi dari berbagai kultur.¹⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan multikultural yang disebutkan James A Banks dalam Reissman dalam Zubaedi (2006):

*“The goal of multicultural education is an education for freedom... Multicultural education should help student to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in a democratic and free society... Multicultural education promotes the freedom, abilities and skills to cross ethnic and cultural boundaries to participation in other cultures and groups”.*²⁰

Multikulturalisme tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karena pendidikan merupakan bagian dari budaya, dengan kata lain di dalam pendidikan terdapat akar-akar kultur yang berasal dari masyarakat. Di lain sisi, budaya tidak akan berkembang dan berkelanjutan tanpa pendidikan karena budaya tidak diwariskan secara generatif tetapi diperoleh dengan sosialisasi dan belajar. Menurut Tilaar dalam Maslikhah, mengisolasi pendidikan dari keanekaan budaya berarti melihat proses pendidikan dalam ruangan yang hampa.²¹

¹⁸ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hal. 34

¹⁹ Lihat dalam Andreas A. Susanto dalam Josep J. Darmawan (ed)., *Multikulturalisme: Alternatif yang Problematik*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).

²⁰ Zubaedi, op.cit., hal. 70.

²¹ Maslikhah. op.cit., hal 23.

Pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam pola pembelajaran inklusif, yaitu metode pembelajaran yang tidak membedakan peserta didik yang memiliki berbagai kemampuan inteligensia (cerdas, sedang, kurang) atau berbagai kondisi fisik (di fabel/non difabel). Siswa tidak sekedar *dicekoki* ilmu pengetahuan namun juga kemampuan untuk hidup bersama di dalam masyarakat plural, misalnya toleransi dan saling menghormati dengan golongan masyarakat yang terkadang dianggap *liyan*.

Pendidikan yang menghargai perbedaan ini didasari oleh konsep kebermaknaan perbedaan yang unik pada tiap orang dan masyarakat. Ia merupakan pendidikan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan sesama yang beragam baik dari segi fisik, agama, suku, dan lain-lain. Pendidikan multikultural mengandaikan sekolah dan kelas dikelola sebagai simulasi arena kehidupan nyata yang plural, terus berkembang dan berubah. Hal ini didasari oleh adanya kepekaan dan solidaritas di antara peserta didik. Potensi transedental, intelektual, moral dan estetis dikembangkan dengan cara mengintegrasikan nuansa moralitas dan spiritual di dalam kurikulum. Pelajaran agama pun tidak sekedar merupakan penyalehan individu namun lebih dari itu, pelajaran agama yang diberikan berfungsi untuk penyalehan sosial. Sikap dan sifat yang umumnya berkembang di masyarakat plural seperti di Indonesia antara lain memiliki solidaritas buta, etnosentrisme, partikularis, eksklusif serta masalah mayoritas-minoritas yang berujung pada ketidakadilan di dalam masyarakat. Sebagai negara yang memiliki beragam etnis, religi dan budaya, Indonesia perlu menerapkan pola pendidikan yang mampu menghadapi keberagaman.

Hidup bersama di dalam masyarakat tidak sekedar membiarkan segala sesuatunya berbeda namun juga mengenali dan memahami perbedaan itu sehingga setiap elemen yang hidup bersama di suatu masyarakat memiliki kedudukan yang sejajar tanpa adanya dominasi dari kultur tertentu. Oleh karena itu, paradigma multikulturalisme yang mempercayai bahwa semua kultur memiliki kedudukan yang sama dan menghilangkan perspektif kultur dominan non dominan tepat jika diterapkan di dalam sistem pendidikan kita.

Pendidikan multikultural dikatakan berhasil jika di dalam masyarakat terjadi perubahan cara berpikir dari yang sebelumnya bercara pandang dan interpretasi sosial budaya sempit dan fanatis berubah menjadi cara pandang dan interpretasi demokratis-pluralis dan mampu menghargai budaya orang lain.²² Maksudnya, siswa mampu menghargai segala perbedaan di dalam masyarakat dan menganggap perbedaan itu sebagai

²² Zubaedi, op.cit., hal. 79.

realitas yang harus ada dan diterima di dalam kehidupan bermasyarakat. James mengungkapkan, “substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as “education for freedom”*) sekaligus sebagai penyebarluasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*)”.²³ Jadi, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang bersifat antirasis (dan anti perbedaan berdasar etnis, suku, maupun agama), mendasar, penting (berguna) untuk semua siswa, perpasif (dapat meresap/ menembus/ merembes), untuk keadilan sosial serta merupakan sebuah proses pedagogi kritis.

4. Kerangka Pemikiran

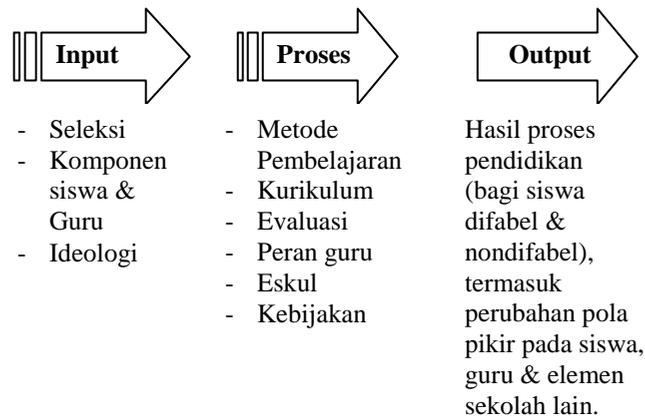
Salah satu ciri hakiki manusia ialah bahwa ia menyadari eksistensinya, dengan situasinya dan dimensinya.²⁴ Penyadaran ini dapat ditemukan pada pendidikan yang menghargai keberagaman, yaitu pendidikan yang memberi kesempatan kepada setiap kelompok kultural untuk berkontribusi dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan multikultural yang menghargai keberagaman tidak terjadi secara serta-merta namun didasari kesadaran dari pendidik dan peserta didik untuk hidup berdampingan dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut Keith Wilson, beberapa kelengkapan yang harus dimiliki oleh segenap civitas akademika sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang multikultural, antara lain: a) lingkungan belajar yang mendukung kontak positif antar “ras”, b) kurikulum multikultural, c) cara berpikir yang positif dari para guru, d) dukungan administrasi, dan e) lokakarya dan pelatihan guru secara terus-menerus tentang multikulturalisme.²⁵

Terdapat berbagai elemen pendidikan inklusi yang terkait sebagai satu kesatuan pendukung pendidikan inklusi. Elemen-elemen ini memiliki peran masing-masing yang khas dan pokok namun tidak dapat dipisahkan dalam praksis pendidikan inklusif. Penulis mengategorisasi elemen-elemen tersebut menjadi tiga golongan, yaitu *input* (menjadi awal konstruksi pendidikan inklusif), *proses* (berperan dalam praksis pendidikan inklusif) dan *output* (hasil proses pendidikan inklusif).

²³ Ibid., hal. 70-1.

²⁴ Broto Semedi Wiryoteno, *Hidup Bersama Orang Lain*, Gema No.27, Edisi Desember, 1984, hal 5.

²⁵ Wilson dalam Ronald Sidharta, *Augmented Reality Tangible Interfaces for CAD Design Review*, (USA: Iowa State University, 2005), hal. 87



E. Definisi Operasional

1. Konstruksi

Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan kata dalam kelompok kata.²⁶ Sedangkan menurut kamus komunikasi, definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur.²⁷

Masyarakat merupakan sistem sosial-budaya yang mengintegrasikan keseluruhan individu dengan keanekaragaman peran dan status sosialnya ke dalam proses-proses sosial berdasarkan nilai dan norma. Konstruksi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah konstruksi sosial dalam pendidikan. Dalam kaitannya dengan pendidikan, konstruksi sosial adalah model pembelajaran di masyarakat. Konstruksi sosial merupakan pembelajaran dalam tradisi *reflective inquiry* yang bertujuan membentuk manusia berkarakter yang mampu membuat keputusan. Konstruksi sosial adalah konsep yang menggambarkan bagaimana realitas sosial dibentuk dan dimaknai secara subjektif oleh anggota masyarakat.

2. Model Praksis

Model praksis ini adalah cara berteologi yang dianggap lebih baru yang sering disamakan dengan Teologi Pembebasan dan juga sudah mulai digunakan di dalam Teologi Praktika. Model ini adalah suatu cara berteologi yang secara intensif dibentuk oleh pengetahuan. Hal ini dapat dilihat terlebih melalui aksi yang bersifat reflektif. Model ini juga menyangkut pengenalan akan makna dan pemberian sumbangsih bagi perubahan sosial. Dengan demikian, model ini tidak mendapatkan inspirasi dari teks-teks klasik atau pedoman tingkah laku klasik,

²⁶ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 264

²⁷ Ibid.

tetapi dari realitas-realitas masa kini dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Artinya model praksis adalah salah satu pendekatan terhadap teologi kontekstual. Model ini secara intensif dibentuk oleh pengetahuan yang berasal dari aksi dan refleksi. Model Praksis membantu pengenalan akan makna dan dapat memberikan sumbangsih bagi perubahan sosial.

Model praksis yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu sebuah model yang memberi penekanan kepada identitas pendidikan di dalam sebuah konteks tertentu (dalam hal ini adalah pendidikan inklusif) yang berhubungan dengan perubahan sosial dan keberagaman.

3. Pendidikan Inklusif

Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusif adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat, berbakat. Anak-anak jalanan dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah. Anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik, atau budaya dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi.²⁸ Pendidikan inklusif adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler (SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA, dan SMK/MAK) yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.²⁹

Pendidikan inklusif yang penulis maksudkan di sini adalah sebagaimana yang tertuang dalam UU. No. 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1, yaitu pendidikan yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pribadinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh sebab itu inti dari pendidikan inklusif adalah hak azasi manusia atas pendidikan. Suatu konsekuensi logis dari hak ini adalah semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan dengan kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, kemampuan dan lain-lain. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusif meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua dan oleh masyarakat. Pendidikan inklusif didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.

²⁸ Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), hal. 82

²⁹ Lay Kekeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inklusif*, (Jakarta: Depdiknas, 2007), hal. 145

F. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bersumber dari buku-buku yang berkenaan dengan gagasan pendidikan inklusif dan buku-buku yang berkenaan dengan konsep pendidikan inklusif, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena data yang dihasilkan adalah bersifat deskriptif analitis. Yakni memaparkan permasalahan secara apa adanya berdasarkan sumber-sumber rujukan otoritatif dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Selain itu, pendekatan sosial juga digunakan dengan maksud untuk lebih memahami dan menjelaskan masalah-masalah yang dirumuskan, terutama yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan dan mendukung penelitian ini adalah teori konstruksi sosial, atau dalam istilah yang lain dikenal dengan istilah konstruksi atas realitas sosial (*social construction of reality*).

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif-kualitatif dan menggunakan metode kepustakaan (*library Research*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu teknik eksplorasi dan analisa dalam penyelidikan mengenai sebuah kesatuan sosial tertentu.³⁰ Menurut Yin, studi kasus dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa tersebut tidak dapat dimanipulasi.³¹ Kasus di dalam penelitian studi kasus bersifat kontemporer, masih terkait dengan masa kini, baik yang sedang terjadi, akan terjadi, maupun telah selesai tetapi masih memiliki dampak yang masih terasa pada saat dilakukannya penelitian.³² Tidak semua peristiwa/fenomena dapat diteliti dengan metode studi kasus yang menuntut eksplorasi yang mendalam dan intensif. Metode ini dipilih karena dirasa sesuai dan holistik di dalam pengumpulan data sesuai tema yang dipilih oleh peneliti. Obyek penyelidikan di dalam studi kasus dapat berupa seseorang, suatu keluarga, suatu kelompok kebudayaan,

³⁰ Komaruddin, *Kamus Riset*, (Bandung: Angkasa, CET. x, 1987).

³¹ Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. VIII, 2008), hal. 12. Lihat juga dalam Tabrani. ZA, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014).

³² Tabrani. ZA, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014), hal. 30

suatu pranata, suatu isu, atau suatu kelompok masyarakat.³³ Dalam penelitian ini, obyek penyelidikan yang dimaksud adalah suatu pranata dan isu berdasarkan ide dan pendapat-pendapat para ahli yang berkenaan dengan pendidikan inklusif.

Metode kualitatif juga penulis rasa dapat mengetahui “*the means behind the facts*” atas berbagai peristiwa sosial yang terjadi karena berakar pada paradigma interpretatif. Hal ini ditunjukkan dari adanya beberapa perbedaan mendasar pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu:

1. Cara memandang sifat realitas sosial Penelitian kualitatif menganggap realitas sosial itu bersifat ganda. Realitas sosial merupakan hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistik. Di pihak lain, penelitian kuantitatif memandang realitas sosial bersifat tunggal, konkret, dan teramati.
2. Peranan nilai Penelitian kualitatif menganggap bahwa proses penelitian tidak dapat dikatakan sebagai sepenuhnya ‘bebas nilai’. Di pihak lain, penelitian kuantitatif menganggap bahwa proses penelitian sepenuhnya ‘bebas nilai’.
3. Fleksibilitas dalam pengumpulan data Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku tetapi selalu disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Demikian pula hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif prosedur pengumpulan data distandarisasi dan menganggap bahwa hubungan peneliti dengan yang diteliti adalah independen dan dapat dipisahkan.³⁴

Studi kasus tunggal menyajikan suatu kasus yang ekstrem atau unik. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tunggal yang bertujuan menelusuri, menyingkap dan menggambarkan secara rinci eksistensi pendidikan inklusif untuk mengetahui makna dibalik eksistensinya. Melalui studi kasus, kita dapat mengetahui keunikan dari fenomena pendidikan inklusif yang bisa atau akan diterapkan serta menjelaskan keunikan tersebut, yang berkaitan dengan pola pembelajaran dan instrumen pendidikan.

C. Sasaran Penelitian dan Sumber Data

Menurut Hendrarso, penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya.³⁵ Oleh karena itu, tidak ada istilah populasi dan sampel pada penelitian kualitatif. Informan adalah subjek yang akan memberi informasi selama penelitian berlangsung. Hendrarso menyebutkan, informan meliputi beberapa macam, yaitu informan kunci yang mengetahui dan memiliki informasi

³³ Komaruddin, op. cit.

³⁴ Emy Susanti Hendrarso dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (editor), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, cet. III, 2007), hal. 170. Bandingkan dengan Tabrani, ZA, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014).

³⁵ Ibid, hal. 171-2.

pokok yang diperlukan dalam penelitian, informan utama yang terlibat langsung dalam interaksi sosial fenomena yang diteliti, serta informan tambahan yang dapat memberikan informasi walau pun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial fenomena yang diteliti.

Untuk mendapatkan data yang mendukung, peneliti membatasi informan dalam penelitian ini adalah data-data informasi dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan pendidikan inklusif dan juga informasi lain yang berhubungan dengannya.

Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu bisa diperoleh. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan personal dokumen sebagai sumber data dalam penelitian ini. Personal dokumen adalah dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaannya.³⁶ Personal bacaan sebagai sumber dasar utama atau data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan gagasan pendidikan inklusif dan buku-buku yang berkenaan dengan konsep pendidikan inklusif, serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian *library research* adalah dengan mengumpulkan buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Langkah ini biasanya dikenal dengan metode dokumentasi. Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³⁷ Teknik ini peneliti gunakan dalam rangka mengumpulkan data yang terdapat dalam berbagai karya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan

³⁶ Ahmad Sonhaji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (ed.), Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada, 1996), hal. 82

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 206

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, mendeskripsikan dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *content analysis* (analisis isi).³⁸ Teknik ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun melalui penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif analitis yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistematis dan menyeluruh.

Adapun langkah-langkahnya adalah dengan menyeleksi teks yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik, melaksanakan penelitian, dan menyetengahkan kesimpulan.³⁹ Selain itu, untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap perlu yaitu:

1. Metode Deduksi

Metode ini merupakan akar pembahasan yang berangkat dari realitas yang bersifat umum kepada sebuah pemaknaan yang bersifat khusus.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk menguraikan data dari suatu pendapat yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Definisi di atas menggambarkan bahwa, metode deduksi bersifat pasti atau tidak spekulatif. Deduktif juga bersifat khusus. Contoh “semua manusia akan mati” (premis mayor), “Amir adalah manusia” karena Amir adalah manusia, maka Amir memiliki sifat-sifat yang dimiliki manusia. Oleh karena itu secara deduktif “Amir juga akan mati”.

2. Metode Induksi

Metode ini merupakan alur pembahasan yang berangkat dari realita yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian dari realita-realita yang konkret itu ditarik secara general yang bersifat umum.⁴¹ Metode ini berbeda dengan metode deduksi karena sifatnya spekulatif. Contoh. “Rani butuh makan”,

³⁸ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49.

³⁹ Sojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan penerapan* (PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 16-17

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal. 42

⁴¹ Ibid.

“Reni butuh makan”, dan “Rini juga butuh makan”. Dengan induksi maka diambil kesimpulan bahwa “semua manusia butuh makan”. Pengambilan kesimpulan seperti itu akan berpotensi kesalahan.

3. Metode Komparasi

Dengan metode ini dimaksudkan untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari beberapa ide dan sekaligus mengetahui lainnya kemudian dapat ditarik konklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Supratikno. *Hantu Masyarakat Bernama Pendidikan*, dalam Basis, No.01-02, Tahun ke-47 1998
- A. Waidl. *Pendidikan yang Memahami Manusia* dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Ahmad Sonhaji, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif, dalam Imron Arifin (ed.), Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*, Malang: Kalimasahada, 1996.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Andreas A. Susanto dalam Josep J. Darmawan (ed.), *Multikulturalisme: Alternatif yang Problematis*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005).
- Broto Semedi Wiryotenoyo, *Hidup Bersama Orang Lain*, Gema No.27, Edisi Desember, 1984.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Emy Susanti Hendrarso dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (editor), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, cet. III, 2007.
- H.A.R. Tilaar. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- J. Sudarminta, *Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga* dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, CET. x, 1987.
- Lay Kekeh Marthan, *Manajemen Pendidikan Inkusif*, Jakarta: Depdiknas, 2007
- Leo Sutrisno, *Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme* dalam Th. Sumartana, dkk. *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 2001.
- Lihat Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, Bandung: Jemmars, 1983.
- Montemayor dalam YB. Adimassana, *Revitalisasi Pendidikan Nilai di Dalam Sektor Pendidikan Formal* dalam A. Atmadi dan Y. Setiyaningsih (Editor), *Transformasi Pendidikan: Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Muslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur: Rekonstruksi Sistem Pendidikan Berbasis Kebangsaan*, Salatiga: STAIN Salatiga Press bekerjasama dengan JP Books, 2007.

- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, cet. VI, edisi Revisi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008.
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, cet. VIII, 2008.
- Ronald Sidharta, *Augmented Reality Tangible Interfaces for CAD Design Review*, USA: Iowa State University, 2005
- Sojono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan penerapan*, PT. Rineka Cipta, 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Tabrani. ZA, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014.
- Tarmansyah, *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta: Depdiknas, 2007
- YB. Mangunwijaya, Kompas, 28 September 1988 dalam Y. Dedy Pradipto, *Belajar Sejati VS Kurikulum Nasional: Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Yosef Dedy Pradipto, *Belajar Sejati versus Kurikulum Nasional*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, 2006.